



“Beragama yang Mencerahkan”

**TANWIR
MUHAMMADIYAH**

BENGKULU 15-17 FEBRUARI 2019 M
10-12 JUMADIL AHIR 1440 H

REKOMENDASI

**Tanwir Muhammadiyah
Tahun 2019 di Bengkulu**

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

REKOMENDASI TANWIR MUHAMMADIYAH DI KOTA BENGKULU

**PEMIKIRAN STRATEGIS KEBANGSAAN
TANWIR MUHAMMADIYAH BAGI
PEMEGANG MANDAT RAKYAT TAHUN 2019**

**Keputusan Tanwir Muhammadiyah
Tahun 2019 di Bengkulu**

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

KEPUTUSAN TANWIR MUHAMMADIYAH TAHUN 2019 TENTANG REKOMENDASI TANWIR MUHAMMADIYAH DI KOTA BENGKULU

PEMIKIRAN STRATEGIS KEBANGSAAN TANWIR MUHAMMADIYAH BAGI PEMEGANG MANDAT RAKYAT TAHUN 2019

Pemilihan Umum tahun 2019 untuk pemilihan Presiden dan Wakil Prersiden maupun Pemilihan Anggota Legislatif sejatinya merupakan proses politik demokratis memilih para pemimpin bangsa. Pemilu hendaknya berlangsung dengan jujur, terpercaya, taat asas, dan berlangsung adil atau *fair* agar hasilnya bersih dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan konstitusional di hadapan mahkamah rakyat.

Bagi rakyat Indonesia Pemilu 2019 merupakan proses demokrasi yang akan menentukan masa depannya yang berdasar pada prinsip kekuasaan dari, oleh, dan untuk rakyat. Warga negara yang menggunakan hak pilih hendaknya menggunakan hak politiknya secara aktif, cerdas, paham, dan bertanggungjawab sebagai bentuk komitmen kebangsaan. Sikap masa bodoh dan tidak menggunakan hak pilih bukanlah tindakan yang bijak dan bertanggung jawab meskipun hal itu merupakan hak politik setiap warga negara.

Para kontestan maupun tim sukses dan pendukung hendaknya menjadikan Pemilu sebagai bentuk kontestasi politik demokratis yang mesti diikuti dengan taat aturan, cerdas, dewasa, bertanggung jawab, dan berkeadaban mulia. Jauhi sikap dan tindakan yang membawa suasana permusuhan, kebencian, saling merendahkan martabat, penggunaan segala cara yang tidak benar, dan hal-hal yang menyebabkan retak sesama keluarga besar bangsa.

Penyelenggara Pemilu diharapkan menegakkan aturan dengan sebaik-baiknya, menjunjung tinggi konstitusi, serta bersikap adil tanpa diskriminasi. Di pundak penyelenggara Pemilu terletak tanggung jawab konstitusional dan moral kebangsaan yang tinggi untuk mengantarkan proses demokrasi itu benar-benar berhasil dengan aman, damai, dan sesuai aturan yang berlaku sehingga menjadi jalan demokrasi yang makin substantif dalam pembangunan politik Indonesia yang berkemajuan.

Bagi seluruh komponen bangsa hendaknya aktif mengawal Pemilu 2019 sebagai jalan demokrasi untuk membawa Indonesia pada pencapaian kemajuan dan cita-cita nasional sebagaimana diidealisasikan oleh para pendiri bangsa tahun 1945. Hendaknya semua pihak di tubuh bangsa menjunjung tinggi moralitas politik yang berkeadaban tinggi dalam menjadikan Pemilu bukan semata menghasilkan para pemegang mandat yang sah secara politik tetapi benar-benar berkomitmen tinggi dalam menggunakan amanat kekuasaan untuk sebesar-besarnya kepentingan bangsa dan negara.

Bagi para elite yang terpilih dalam Pemilu 2019 khususnya para calon Presiden dan Wakil Presiden hendaknya menyadari sepenuhnya bahwa proses politik lima tahunan tersebut akan mengantarkan para kontestan itu sebagai pemegang mandat rakyat yang atas nama Konstitusi Dasar bersumpah setia untuk melindungi, menyejahterakan, mencerdaskan, dan memajukan Indonesia. Para pemimpin itu wajib melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia untuk sebesar-besarnya kemajuan Indonesia. Sungguh berat kewajiban dan tugas konstitusional yang harus ditunaikan oleh para pemimpin bangsa itu yang menuntut kekuatan komitmen, integritas, kecerdasan, visi, etika, kehormatan, pemenuhan janji, keberanian, dan keteladanan mulia. Di pundak para elite bangsa itu terletak nasib Indonesia ke depan yang harus memimpin dengan jiwa kenegarawanan yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri, kroni, dan golongan sendiri.

Karenanya Muhammadiyah dalam Tanwir Bengkulu 2019 menyampaikan pemikiran dan agenda strategis yang dapat menjadi bahan kebijakan para pemegang mandat rakyat lima tahun ke depan:

1. Menjadikan Agama, Pancasila, dan kebudayaan luhur bangsa Indonesia sebagai fondasi nilai dan sumber inspirasi yang mendasar dalam mewujudkan kebijakan-kebijakan strategis negara serta arah moral-spiritual bangsa. Kebijakan-kebijakan pemerintah hendaknya tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar dan luhur

yang hidup dalam jatidiri bangsa tersebut seraya menghindari primordialisme SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan) yang dapat meruntuhkan keutuhan, persatuan, dan kesatuan bangsa.

2. Menegakkan kedaulatan negara di bidang politik, ekonomi, dan budaya termasuk dalam pengelolaan sumberdaya alam melalui kebijakan-kebijakan strategis yang pro-rakyat dan mengutamakan hajat hidup bangsa. Dalam menjalankan amanat agar benar-benar menjaga kedaulatan negara dari penetrasi asing dalam segala bentuknya, mengutamakan sumberdaya dalam negeri, menegakkan kedaulatan pangan, dan memutus mata-rantai ketergantungan impor yang merugikan kehidupan rakyat dan masa depan bangsa.
3. Mengatasi kesenjangan sosial-ekonomi secara progresif dengan kebijakan-kebijakan yang berani khususnya dalam menghadapi sekelompok kecil yang menguasai ekonomi dan kekayaan Indonesia agar tidak merugikan hajat hidup mayoritas rakyat sesuai dengan Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia dan amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
4. Melakukan rekonstruksi pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia berbasis pada karakter bangsa sebagai prioritas penting dalam kebijakan pemerintah untuk menjadikan Indonesia unggul dan berdaya-saing tinggi dengan negara-negara lain yang telah maju. Hendaknya ditempuh kebijakan yang benar-benar terfokus, tegas, dan jelas dalam memanfaatkan 20

persen anggaran pendidikan untuk semata-mata pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang unggul sebagaimana amanat konstitusi.

5. Menjalankan pemerintahan dengan prinsip negara hukum sebagaimana amanat konstitusi serta menegakkan hukum secara adil dan tanpa diskriminasi. Hukum jangan dijadikan alat kekuasaan dan politik tertentu yang merugikan kepentingan umum dan menyebabkan hilangnya kesamaan kedudukan semua orang di depan hukum (*equality before the law*). Pejabat negara yang diberi jabatan dalam penegakkan hukum hendaknya bebas dari partai politik dan kepentingan politik apapun yang menyebabkan terjadinya politisasi dan penyalahgunaan hukum yang merusak tatanan berbangsa dan bernegara.
6. Melakukan kebijakan reformasi birokrasi yang progresif dan sistemik dengan prinsip *good governance* serta birokrasi pemerintahan untuk semua rakyat yang menjunjung tinggi meritokrasi dan profesionalisme tanpa disandera oleh kepentingan-kepentingan politik partisan dari para pejabat pemerintahan maupun partai politik dan golongan. Dalam reformasi birokrasi tersebut penting menjadikan pemberantasan korupsi sebagai agenda kebijakan utama sehingga pemerintahan bebas dari penyakit yang menghancurkan tatanan bangsa dan negara.
7. Melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif dan berdaulat dalam melindungi kepentingan dalam negeri,

serta menjadikan Indonesia selaku negara dengan penduduk muslim terbesar sebagai kekuatan strategis dalam percaturan global. Dalam sejumlah hal yang menyangkut kepentingan dalam negeri serta tegaknya perdamaian dunia hendaknya Indonesia lebih tegas dan berani dalam menjalankan kebijakan politik luar negeri sesuai jati diri negara yang berdaulat.

8. Penataan kembali pelaksanaan kebijakan kesehatan termasuk didalamnya Sistem Jaminan Kesehatan, peningkatan peran perempuan dalam pembangunan, fasilitasi kaum difabel dan penanganan kebencanaan yang lebih optimal dalam rangka menciptakan kesejahteraan yang berkeadilan terhadap mereka yang membutuhkan.
9. Penguatan organisasi kemasyarakatan dan *civil society* diantaranya Muhammadiyah yang telah berjuang dan berperanserta mendirikan Republik Indonesia agar benar-benar memiliki posisi serta peranan penting dan strategis serta tidak mengalami peminggiran dan diskriminasi dalam kehidupan bernegara. Organisasi kemasyarakatan tersebut berfungsi sebagai kekuatan moral yang menegakkan nilai-nilai utama kebangsaan sekaligus menjadi kekuatan kritik-konstruktif dan penyeimbang demi tegaknya Indonesia sebagai negara-bangsa yang benar-benar merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur sebagaimana dicita-citakan oleh para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia.



PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

YOGYAKARTA

Jl. Cik Ditiro 23 Yogyakarta 55225
Tel. (0274) 553132 Faks. (0274) 553137

JAKARTA

Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah
Jl.Menteng Raya 62 Jakarta 10340
Tel. (021) 3903021, 3903022 Faks. (021) 3903024